**OPTIMALISASI PERAN ORMAS OLEH BADAN KESBANGPOL DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**DI KABUPATEN TABANAN**

I Putu Adhi Suryanata

NPP. 29.1220

*Asdaf Kabupaten Tabanan Provinsi Bali*

*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

 Email: putuadhisurya2704@gamil.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on deviations from the initial goal of forming mass organizations that need to be re-optimized in order to achieve a safe and orderly state.. **Purpose:**The purpose of this study is to find out how to optimize the role of community organizations in creating security and public order in Tabanan Regency and how the role of the National Police and National Police Agency in supporting the optimization of the role of the Ormas. **Method:**The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Result:**The results of this study indicate that the role of community organizations in Tabanan Regency is good and very active in implementing social community programs, although there are several obstacles in the financing of program implementation and inadequate human resources. The government's efforts, in this case the National Unity and Political Agency of Tabanan Regency, in encouraging the role of Ormas in protecting the community have not been fully carried out properly and optimally, judging from the form of programs that only socialization and supervision in the form of Ormas registration administration. **Conclusion:** The conclusion in this study is that the role of mass organizations has been optimal in Tabanan Regency in terms of the fulfillment of the optimization dimensions, namely Efficiency, Effectiveness, and Economical. while the efforts made by the government have not been maximized because most of the programs have not been running well.

**Keywords:** Optimization, Ormas, Kesbangpol, security, public order

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari tujuan awal dibentuknya ormas yang perlu di optimalkan kembali guna mencapai keadaan yang aman dan tertib. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan dan bagaimana peranan Badan Kesbangpol dalam mendukung pengoptimalan peran Ormas tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabanan sudah baik dan sangat aktif dalam melaksanakan program sosial kemasyarakatan, walaupun ada beberapa kendala pada pembiayaan pelaksanaan program dan SDM yang kurang memadai. Upaya pemerintah yang dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabanan dalam mendorong peranan Ormas dalam perlindungan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dan maksimal, dilihat dari bentuk program yang dilakukan hanya sosialisasi dan pengawasan dalam bentuk admininstrasi pendaftaran Ormas. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah peran ormas sudah optimal di kabupaten tabanan ditinjau dari sudah terpenuhinya dimensi optimalisasi yaitu Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis. sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah belum maksimal karena sebagian besar program belum berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Optimalisasi, Ormas, Kesbangpol, keamanan, ketertiban

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum adalah suatu konsep yang menunjukan bahwa Indonesia menjalankan fungsi pengaturan berdasarkan konstitusi dasar yaitu UUD 1945. Salah satu kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur adalah hak masyarakat untuk membentuk suatu kelompok atau perkumpulan yang diatur pada Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Wibowo & Harefa (2015), bentuk implementasi atas hak setiap orang untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat tersebut adalah pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Hal ini selanjutnya direalisasikan dengan UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah suatu perkumpulan yang dibuat oleh masyarakat dan dibentuk berdasarkan aspirasi, tujuan dan cita-cita yang sama berdasarkan aspek sukarela untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebagai bentuk dukungan dalam mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai perantara memberikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, sebagai wadah yang memberikan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri, berfungsi menjaga adat dan budaya serta nilai-nilai agama, melestarikan dan memelihara norma-norma yang ada di masyarakat baik itu moral, etika, dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, dan fungsi yang lainnya yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ormas memiliki perkembangan yang sangat pesat setelah runtuhnya masa Orde Baru dan dimulainya masa Reformasi Indonesia dengan sistem demokrasi yang menjunjung nilai-nilai HAM. Salah satu contohnya adalah kebebasan untuk berkumpul dan berserikat dengan membentuk suatu organisasi kemasyarakatan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 juli 2019 menunjukan bahwa Ormas yang terdaftar berjumlah 420.381 yang terbagi atas tiga kategori yaitu Ormas dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) berjumlah 25.812, Ormas yang berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berjumlah 393.497, dan yang terakhir adalah kategori Ormas Asing yang terdaftar di Kementrian Luar negeri yang berjumlah 72 Ormas. (kemendagri.co.id, 2019)

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Provinsi Bali juga memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dilihat dari data jumlah ormas yang terdaftar. Ini merupakan suatu sistem yang ada dalam pemerintahan yang erat kaitannya dengan kemajuan demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Bali. Dari sekian banyak Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Bali, Ada tiga Ormas besar yang terkenal dan juga terbesar di Bali, yaitu Laskar Bali, Baladika Bali dan Juga PBB (Pemuda Bali Bersatu).

Semakin besarnya suatu Organisasi Kemasyarakatan maka kepentingan yang diinginkannya memiliki persentase atau peluang yang besar untuk diwujudkan. Tidak jarang mewujudkan kepentingan-kepentingan yang diinginkan dengan cara yang tidak baik atau diluar jalur-jalur hukum yang berlaku seperti memanfaatkan kekuatan-kekuatan besar di pemerintahan demi mendapatkan akses masuk di pemerintahan seperti mendapatkan posisi jabatan maupun mendapat perlindungan. Ini merupakan salah satu bentuk penyelewengan yang timbul dari pergeseran visi dan misi awal dibentuknya Ormas itu sendiri.

Maka dari itu, perlunya mengoptimalkan lagi peran dari Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabanan guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**.

Pergeseran visi dan misi yang dilakukan tahun-tahun belakangan ini memang sudah diluar kewajaran. Masuknya Ormas Laskar Bali dalam menyukseskan pasangan calon Gubernur Bali yaitu KBS-Ace pada Pilgub 2018 merupakan salah satu penyimpangan visi dan misi oleh Ormas itu sendiri (suksesinews.net, 2021). Dengan adanya dukungan yang diberikan kepada penguasa politik maka akan rentan terjadi simbiosis mutualisme antara Ormas dan juga orang yang berpolitik. Ormas akan meminta jabatan dan dan perlindungan hukum sedangkan orang yang berpolitik akan meminta keamanan dalam setiak kepentingan politiknya. Ini menunjukan kapasitas yang rendah dari Ormas itu sendiri dan akan rentan ditunggangi penguasa demi kepentingan beberapa kelompok saja.

Selain itu, para Ormas juga sering meresahkan masyarakat dengan masifnya terjadi kontak fisik atau bentrokan antar ormas di lingkungan masyarakat. Hal itu terjadi karena motif yang berbeda-beda seperti perebutan wilayah kekuasaan, balas dendam terhadap permasalahan yang belum selesai di masa lalu, benturan kepentingan politik organisasi dalam mencapai tujuan masing-masing organisasi, sifat egoisme dan ingin menunjukan identitas organisasi. Ormas yang seharusnya melindungi masyarakat malah menunjukan sikap yang sebaliknya yaitu membuat masyarakat tidak aman dan tentram.

Gangguan keamanan dan ketertiban juga timbul dari Anggota Ormas yang ada di Kabupaten Tabanan. Timbulnya aksi premanisme dan pemalakan ke pedagang kaki lima dengan alasan uang keamanan sangat membebani pedagang sehingga menimbulkan rasa takut dan resah pada masyarakat itu sendiri. Hal ini sangat tidak sesuai dengan fungsi ormas itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat tapi malah sebaliknya menindas masyarakat. Ini menyebabkan timbulnya berbagai reaksi masyarakat seperti rasa kecemasan, ketakutan, dan rasa jengkel terhadap oknum Ormas tersebut. Jika dibiarkan, ini akan menjadi suatu bentuk legitimasi kegiatan kekerasan yang akan tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kondisi seperti ini akan meracuni generasi muda bahwa bentuk sesungguhnya dari suatu organisasi kemasyarakatan tersebut adalah kekerasan, pembunuhan, anarkisme yang sudah sah dan dianggap biasa di tengah masyarakat.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran organisasi kemasyarakatan maupun upaya pengoptimalan organisasi kemasyarakatan. Penelitian (Herdiansah, 2016), Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia dengan metode kajian literatur, data sekunder berupa dokumen, Undang-Undang, arsip, artikel, dan buku. Penelitan ini menemukan bahwa Ormas/ LSM memiliki peran yang penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya sebagai penyalur aspirasi dan pengawas pemerintah namun sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian (Anastasya, 2017), Peran Anggota Ormas (Organisasi Masyarakat) atau OKP (Organisasi Kepemudaan) dalam Proses Relokasi Pasar Induk Lau Cih (Skripsi Universitas Sumatera Utara) dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menyatakan bahwa Adanya keterlibatan Ormas dalam proses jual beli kios pedagang sebagai perantara atau agen jual beli kios di Pasar Induk Lau Cih, namun Ormas memasang dengan harga komisi yang mahal. Penelitian selanjutnya oleh (Mustofa dan liberty, 2017), Peran Organisasi Masyarakat Dalam Membangun Harmoni Pasca Konflik Antara Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendatang di Lampung Tengah dengan metode pendekatan Participatory Action Research (PAR). Penelitian ini menyatakan Organisasi kemasyarakatan ALMACIDA memiliki peran yang positif dalam membangun harmonisasi pasca konflik di lampung tengah, walaupun Ormas ALMACIDA ini merupakan Organisasi dari masyarakat pendatang. Penelitian (Wibowo dan Harefa, 2015), Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusiyang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat. Penelitian (Wijaya, 2016), Laskar Bali dan Eksistensi di Masyarakat Bali yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasl penelitian ini adalah Pengaruh Laskar Bali terhadap masyarakat Bali adalah dimana kebaradaan mereka membawa dampak positive dan negative. Terjadi konflik antara individu-induvidu yang terdapat pada Laskar Bali dan Baladika namun didalam kepemimpinan ormas tersebut tidak ada konflik sama sekali diantara ormas-ormas ini.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa perbedaan yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, penelitian herdiansah (2016) bertempat di Bandung, sedangkan penelitian anastasya (2017) berlokasi di sumatera utara (pasar induk Lau Cih), dan penelitian Mustofa dan liberti (2017) bertempat di Lampung.Selain itu penelitian pertama dan ketiga memiliki metode penelitian yang berbeda. Penelitian herdiansah menggunakan metode literatur atau pencarian data melalui sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dll. Penelitian Anastasya menggunakan metode penelitian Participatory Action Research (PAR) atau metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul Optimalisasi Peran Ormas oleh Badan Kesbangpol dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tabanan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Tabanan. Sehingga ada beberapa kebaharuan yaitu dari segi lokus, metode penelitian dan permasalahan yang diselesaikan.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengoptimalan peran organisasi kemasyarakatan dan juga bagaimana upaya yang dilakukan badan Kesbangpol dalam memberdayakan Ormas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umumdi Kabupaten Tabanan.

1. **METODE**

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 7 orang yang diambil dari Badan Kesbangpol, Ormas Tabanan, dan juga pedagang di Pasar Tradisional. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN (**

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam tangkilisan (175, 2007). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

**3.1. Optimalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan**

**3.1.1. Teori (Optimalisasi)**

Pengoptimalan kegiatan ormas tersebut dapat dilakukan sesuai dengan indikator-indikator optimalisasi yang dikemukakan oleh Bastian dalam tangkilisan (2007:46-48) yaitu efisiensi, efektifitas, dan ekonomis. Efisiensi adalah dimensi yang digunakan oleh penulis dalam menentukan indikator dalam pengukuran optimal atau tidaknya program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan lima indikato yang digunakan sebagai pengukuran yaitu realisasi program, inovasi, motivasi, manajemen SDM, dan faktor eksternal, maka dua ormas yang digunakan sebagai sampel yaitu Peradah dan Kesatria Keris Bali sudah memenuhi dimensi efisiensi walaupun masih ada keterhambatan dalam indikator realisasi program dan SDm bagi Ormas Peradah. Sedangkan Pada dimensi Efektivitas, semua ormas sudah memenuhinya dengan baik seperti visi dan misi, struktur organisasi dan juga AD/ART. Dimensi ekonomis sebagian besar sudah terpenuhi pada indikator hubungan kerja walaupun ada yang terhambat seperti pada dimensi Sarpras dan juga simtem anggaran.

**3.1.2. Legalistik (UU Nomor 17 th 2013)**

Kabupaten Tabanan memiliki jumlah ormas yang cukup banyak kurang lebih 161 ormas di akhir tahun 2021. Ormas di Tabanan telah melakukan berbagai kegiatan atau program sesuai dengan bunyi dari Pasal 5 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas seperti ormas yang dijadikan sampel oleh peneliti yaitu Ormas Kesatria Keris Bali dan juga Ormas Peradah. Kegiatan Ormas Kesatria Keris Bali dan juga Peradah telah terlaksana sesuai dengan tujuan dari terbentuk ormas itu sendiri sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan melaksanakan kegiatan a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat, c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, d) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, e) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, g) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,dan h) Mewujudkan tujuan negara.

Tabel 1.

Realisasi kegiatan Ormas Tabanan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pasal 5 UU no.17 Tahun 2013 tentang Ormas | Realisasi Program Ormas |
| **Peradah dan KKB** |
| 1 | Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; | * + 1. Memberikan sosialisasi terkait administrasi kepada karang taruna
		2. Memberikan edukasi kepada umat yang baru pindah agama hindu.
 |
| 2 | Memberikan pelayanan kepada masyarakat | 1. Membuat kegiatan sosial kemasyarakatan seperti donor darah, donasi kepada korban bencana, dan bedah rumah.
 |
| 3 | Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;  | * + 1. Melaksanakan ibadah bersama di pura batukaru dan sad khayangan lainnya.
 |
| 4 | Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat | Belum adanya aks penyimpangan yang dilakukan oleh Ormas di Tabanan menunjukan keamanan dan ketertiban tabanan dapat terjamin dengan adanya ormas, malah semakin teroptimalkan dengan berbagai kegiatan positif yang dilakukannya. |
| 5 | Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Melakukan bhakti sosial pembersihan sampah di pantai tanah lot dan juga tempat ibadah (pura) yang ada di sekitar Tabanan. |
| 6 | Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;  | Kegiatan Ormas di Tabanan tidak jarang melibatkan organisasi lain untuk pelaksanaan integrasi demi terwujudnya gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. |

**3.2. Upaya Badan Kesbangpol Tabanan**

**3.2.1. Teori (Keamanan dan Ketertiban Umum)**

Keamanan adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak terganggu akan gangguan fisik maupun batin. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Badan Kesbangpol menyatakan bahwa “Kabupaten Tabanan antara tahun 2021 sampai saat ini (awal 2022) tidak ada gangguang keamanan yang dilakukan oleh Ormas itu sendiri, namun dari segi keamanan pencurian dan kriminal lainnya, artinya perbuatan kriminal individu dan bukan membawa nama organisasi belum ada terjadi. Malahan kegiatan Ormas yang ada di Tabanan memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan yang ada di Kabupaten Tabanan sudah baik dan jauh dari gangguang Ormas yang bentrokan. Selain itu terkait dengan ketertiban umum juga sudah baik dan jauh dari pemalakan Ormas yang didukung dari keterangan dan hasil wawancara pedagang pasar Tradisional yang menyatakan “Disini kondisinya sangat tertib dik. Tidak ada yang aneh – aneh, seperti maling dan termasuk juga pemalakan gak ada. Disini gak pernah ada hubungannya Ormas-ormas itu dengan pasar dauh pala dan gak pernah ada sampai sekarang yang namanya nagih nagih illegal dik kecuali ya kepada pengelola pasarnya aja kita bayar sewa. Gitu dik”. Sehingga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan sudah benar benar baik dan terjaga.

**3.2.2. Legalistik (UU Nomor 17 tahun 2013)**

Upaya yang dapat dilakukan oleh badan kesbangpol dalam mengoptimalkan peran ormas sudah ada tertulis dalam beberapa aturan yang pernah disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut penulis telah merangkum bahwa ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh Kesbangpol dalam pengoptimalan peran Ormas yaitu Pembinaan (Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986), Pemberdayaan (Peraturan mentri dalam negeri Nomor 56 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013), serta Pengawasan ( Undang-undang nomor 17 Tahun 2013). Berdasarkan tiga upaya pemerintah tersebut, Badan Kesbangpol Tabanan telah melaksanakan pembinaan dalam hal pemberian sosialisasi terkait wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dilaksanakan pada bulan desember 2021. Selain itu juga melaksanaan pengawasan dalam bentuk pengawasan administrasi kelengkapan ormas untuk mendapatkan SKT (surat keterangan terdaftar). Upaya Kesbangpol Tabanan belum maksimal karena masih banyak upaya yang dapat dilakukan guna mengoptmalkan peran Ormas yang ada di Kabupaten Tabanan.

**3.3. Diskusi** **Temuan Utama Penelitian**

Pada pelaksanaan seluruh program yang dijalankan oleh Orma Peradah maupun Kesatria Keris Bali di Kabupaten Tabanan sudah dapat digolongkan berjalan dengan optimal karena pelaksanaan program sudah efisien, efektif, dan ekonomis. Ini terlihat dari pelaksanaan program kegiatan sosial yang dijalankan oleh Yayasan Kesatria Keris Bali dalam hal pembersihan pantai dari sampah plastic maupun pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan seperti pemberian dana kepada penyandang penyakit tumor. Semua kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang membantu tugas pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintah dan juga dalam hal perlindungan masyarakat seperti yang ada pada penelitian Herdiansyah yang menemukaan bahwa Ormas/ LSM memiliki peran yang penting dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya sebagai penyalur aspirasi dan pengawas pemerintah namun sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Herdiansyah, 2016).

Selain sebagai pembantu pelaksanaan urusan pemerintah, ormas juga sebagai pencipta ketentraman dan ketertiban umum yang ada dikabupaten Tabanan dilihat dari setiap proses kegiatan yang dilaksanakan pasti melibatkan organisasi atau sumber daya luar organisasi lainnya guna membantu menyukseskan kegiatan dan juga sebagai pemupuk persaudaraan agar terciptanya keharmonisan antar ormas yang ada sehingga jauh dari terjadinya bentrokan. Penelitian tersebut juga sesuai dengan hasl yang di dapatkan oleh penelitian Mustofa dan liberty yang menyatakan ormas sangat berperan dalam membangun harmonisasi pada keadaan konflik di daerah Lampung (Mustofa dan Liberty, 2017).

Walaupun peran Ormas sudah optimal, namun upaya yang diberikan oleh Badan Kesbangpol bisa dibilang kurang maksimal dilihat dari proses pembinaan, pemberdayaan dan juga pengawasan yang dilakukan sangatlah minim. Salah satu contoh adalah dalam hal pengawasan yang seharusnya mengawasi dalam hal ideologi, pelaksanaan kegiatan Ormas yang dilakukan, Laporan program yang dilaksanakan, maupun kelengkapan administrasi yang ada, namun Kesbangpol Tabanan hanya mengawasi kelengkapan yang dibutuhkan untuk membuat SKT bagi ormas di wilayah Tabanan. Sehingga dapat dilihat bahwa pengawasan pemerintah kuranglah maksimal seperti hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh Wibowo dan Harefa yang menyatakan adanya urgensi pemerintah dalam pengawasan terhadap ormas (Wibowo dan Harefa, 2015).

**3.4. Diskusi** **Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan terkait tentang penghambatnya pelaksanaan program yang dialami oleh Ormas Peradah terjadi karena adanya faktor pergantian kepengurusan baru dan juga Ormas peradah hanya tergantung pada dana yang diberikan oleh dinas terkait melalui proposal yang diajukan. Sehingga setiap program yang di rangcang oleh Peradah sangatlah tergantung pada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah.

1. **KESIMPULAN**

Penulis berkesimpulan bahwa peran organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tabanan sudah optimal ditandai dengan sudah terpenuhinya sebagian besar dimensi pengukuran seperti Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Walaupun ada hambatan pada dimensi efisiensi terkait dengan realisasi program dan manajemen SDM terkait dengan penantian dana pemerintah serta sarana dan prasarana kantor pada dimensi ekonomis tidak berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program yang dicanangkan. Sehingga Ormas di Kabupaten Tabanan tetap berperan dengan optimal dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum.

Upaya yang dilakukan Badan Kesbangpol Tabanan kurang maksimal dalam pemberdayaan ormas guna mengoptimalkan perannya dalam menciptakan keamanan danketertiban umum. Ini terlihat dari 3 upaya yang dapat dilakukan yaitu pembinaan, perberdayaan dan pengawasan yang dapat dilakukan, Kesbangpol Tabanan hanya dapat melaksanakan sosialisasi dan pengawasan kelengkapan persyaratan dalam pembatan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bagi Ormas di Tabanan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan ormas Tabanan kurang maksimal.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Ormas sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesbangpol Tabanan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu Ormas Peradah dan Kesatria Keris Bali yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalian informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*,

Prameswari, P. I. (n.d.). *eksistensi organisasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah: studi kasus tentang organisasi masyarakat laskar bali dalam pemilihan gubernur bali 2013*. 1–19.

Sosiologi, D., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Utara, U. S. (2017). *Peran Anggota Ormas ( Organisasi Masyarakat ) atau OKP ( Organisasi Kepemudaan ) dalam Proses Relokasi Pasar Induk Lau Cih SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana OLEH : Feby Anastasya G Kepemudaan ) dalam Proses R*.

Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, *07*(01), 01–19.

Wijaya, K. A. S. (2016). *Laskar Bali Dan Eksistensi Di Masyarakat Bali*.

Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, *1*(1), 49.

Prameswari, P. I. (n.d.). *eksistensi organisasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah: studi kasus tentang organisasi masyarakat laskar bali dalam pemilihan gubernur bali 2013*. 1–19.

Sosiologi, D., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Utara, U. S. (2017). *Peran Anggota Ormas ( Organisasi Masyarakat ) atau OKP ( Organisasi Kepemudaan ) dalam Proses Relokasi Pasar Induk Lau Cih SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana OLEH : Feby Anastasya G Kepemudaan ) dalam Proses R*.

Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, *07*(01), 01–19. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.01-19

Wijaya, K. A. S. (2016). *Laskar Bali Dan Eksistensi Di Masyarakat Bali*. 1–15.